



Analisis KR Calon Tunggal

Prof Dr Tulus Warsito

PILKADA serentak tahun ini, sangat mungkin tidak jadi serentak. Mengingat di beberapa tempat pemilihan hanya diminati oleh pasangan calon tunggal saja, yang berarti akan mengalami penundaan. PKPU No 12 Tahun 2015 mengatur jadwal pelaksanaan Pilkada, jika hingga tanggal pendaftaran terakhir hanya terdapat calon tunggal saja, maka jadwal pendaftaran ditunda sampai tiga hari kemudian. Dan jika sampai batas waktunya masih hanya satu calon tunggal saja maka pelaksanaan Pilkada ditangguhkan hingga 2017.

Pilkada, di samping Pilpres, sebagai salah satu bentuk puncak demokrasi politik menjadi sangat menarik karena pertarungan nama baik tokoh, golongan, partai atau klan muncul secara dramatis dan sensasional. Bagi yang menang seolah Pilkada menjadi lembaga mengesahkan kedigdayaan tokoh maupun kelompoknya. Sebaliknya bagi yang kalah seolah bangkrut dalam arti yang seluas-luasnya. Sudah malu (karena kalah), uang pun habis untuk biaya segala macam perangkat persaingan.

Mengapa dramatis dan sensasional? Karena pada saat Pilkada itulah sosok pribadi calon diekpose sedemikian rupa mengenai

* Bersambung hal 7 kol 4

hal. 1



KR GROUP

KAMIS KLIWON

30 JULI 2015

14 SAWAL 1948

TAHUN LXX NO 292

Calon Tunggal

Sambungan hal 1

bagaimana hebatnya dia, sebaliknya kubu pesaing akan berupaya menghadirkan 'sisi buruk' pesaingnya. Walaupun kampanye hitam dilarang, bukan berarti semua pihak (terutama para pendukungnya) mampu menghentikan gunjingan, gosip negatif mengenai lawan politiknya.

Dalam konsep demokrasi, pemilihan yang baik adalah proses persaingan (kompetisi) dan pertandingan (kontestasi) yang pemenangnya tidak bisa diramalkan sebelumnya. *A good election plays in an uncertainty.* Mengapa demikian? Karena jika pemenangnya sudah diketahui sebelum pertandingan, maka pertandingan itu dilakukan secara tidak berimbang, karena salah satu pemainnya dianggap terlalu kuat daripada yang lain. Dengan demikian Pilkada (maupun Pilpres) yang baik adalah jika persaingan dan pertandingannya seimbang, supaya siapa pun yang menang akan mendapati bahwa pesaingnya bukanlah lawan yang lemah. Lebih tepat lagi, pemilihan dengan selisih suara di bawah 10% dianggap akan menghasilkan kinerja yang skeptik konstruktif, karena pemenangnya menghadapi lawan yang tangguh.

Pada kasus Pilpres terakhir kita merupakan

contoh terbaik dalam konsep demokrasi semacam itu, yaitu dengan selisih suara antara 52% berbanding 48%. Itu terjadi untuk pertama kali di Pilpres Indonesia.

Dalam keadaan seperti itu, baik buruk kinerja pemerintahan seolah tersebar ke kedua kubu. Kalau pemerintah Jokowi dianggap sedemikian buruk kinerjanya, maka sedemikian buruk pulalah kelompok oposannya, karena oposisi (dengan dukungan suara yang kuat, dengan selisih yang hanya sedikit itu) harus selalu mampu menampilkan program-program tandingan yang lebih baik.

Kembali pada pertanyaan: mengapa calon tunggal dipersoalkan; salah satu alasannya adalah untuk menghindarkan, *over possessive*-nya kekuasaan pemenang. Bahkan idealnya, pemilihan tidak hanya harus ada lebih dari satu calon, melainkan juga harus ada setidaknya dua calon kuat yang seimbang, sehingga pemenangnya tidak bisa diduga sebelumnya. Walaupun ada dua calon, tetapi perolehan suaranya menunjukkan 90% lawan 10%, seperti pada kasus Jokowi Walikota Solo yang kedua misalnya, ini adalah potret kaderisasi kepemimpinan yang buruk. Kenapa demikian?

Karena dengan kemenangan telak itu kubu Jokowi bisa (atau tergoda) untuk berbuat semena-mena. Kalaupun bukan pribadi Pak Jokowi yang, ya sangat mungkin para pendukungnya bisa menjadi mudah tergelincir dalam arogansi. *Alhamdulillah* hal itu tidak terjadi karena masa jabatan Jokowi tidak pernah selesai sepenuhnya. Kasus Pemilu Orde Baru menunjukkan kebenaran konsep itu. Selama pemerintahan Soeharto, jauh hari sebelum Pemilu semua orang sudah tahu bahwa yang menang adalah Golkar, yang jadi presiden selalu Soeharto. Apa tidak absurd?

Itulah sebabnya sebenarnya tidak hanya calon tunggal yang dihindarkan, melainkan juga perlunya persaingan dan pertandingan yang berimbang, dengan selisih suara yang tidak terlalu jauh, supaya kinerja pemerintahan daerah ke depan bisa lebih baik. Persoalannya kemudian adalah, apakah kaderisasi kepemimpinan daerah bisa menyiapkan idealita itu? Jawabannya, berpulang pada kedewasaan politik masyarakat.

(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik, Ketua Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).-f